

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### 5.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem pengaturan tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terdiri atas persiapan dan penyelenggaraan telah secara rinci diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada Tahun 2024 memiliki peluang baik dari regulasi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis, sarana dan prasarana yang memadai, anggaran yang cukup dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota dan kesiapan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP. Sedangkan tantangan yang ada seperti disharmonisasi regulasi, sarana dan prasarana di daerah-daerah rawan bencana, anggaran di berbagai daerah tidak cukup untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan irisan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di Tahun 2024.

## 5.2 Saran

1. Perlu dilakukan perencanaan yang strategis dalam menyiapkan regulasi, sarana prasarana yang memadai, anggaran yang memadai efektif dan efisien, penyelenggara pemilu yang menjunjung tinggi etika, moralitas dan profesional dalam melaksanakan tahapan pemilihan agar azas pemilu dan pemilihan yang Lansung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dapat tercapai.
2. Perlu dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang mengatur tentang tahapan pemilu dan pemilihan agar dapat tercapainya keselarasan dalam mengatasi perbedaan atau pertentangan hukum demi kesatuan sistem hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Aisah Putri Budiarti, dkk, Partaipolitik dan pemiluserentak 2019: kandidasi dan koalisi (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021)
- Al-Imam, Abu Nashr Muhammad, "Membongkar Dosa-dosa Pemilu," 2004
- Amin, Yusuf Akbar, "Urgensi Calon PresidenPerseorangan Dalam SistemPemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Rangka MewujudkanSistemPemilihan Umum Yang Demokratis" (UNS (Sebelas Maret University), 2014)
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan, MetodologiPenelitianKualitatif(CV Jejak (Jejak Publisher), 2018)
- Arikunto, Suharsimi, "ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik," 2019
- Asikin, Amirudin Zainal, "PengantarMetode Penelitian Hukum," Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2004
- Asshiddiqie, Jimly, "Konstitusi dan Konstitusionalisme, Konstitusi" (Jakarta: Press, 2005)
- , "MembangunBudaya Sadar BerkonstitusiuntukMewujudkan Negara Hukum yang Demokratis," Bahan OrasiIlmiahPeringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda, 2007
- , "Pengantarilmuhukum tata negara jilid II," 2006
- Barlian, Eri, "MetodologiPenelitianKualitatif Dan Kuantitatif. padang" (Sukabina Press. <https://osf.io/preprints/inarxiv/aucjd>, 2016)
- Bishry, Asni Dewi S, "Komunikasi Antar BudayaDemokrasi Amerika Serikat Versus Komunikasi Antar BudayaDemokrasi Indonesia," Menara Ilmu, 13.7 (2019)
- Budhiati, Ida, "Quo Vadis DemokrasiProsedural Dan Pemilu: SebuahRefleksiTeoritis," Masalah-Masalah Hukum, 42.2 (2013), 268–73
- Budiardjo, Miriam, Dasar-dasarilmupolitik (Gramedia pustakautama, 2003)
- Budiman, Hendra, PilkadaTidakLangsung&demokrasipalsu (MediaPressindo, 2018)
- Busroh, Abu Daud, SistemPemerintahanRepublik Indonesia (Pustaka Bina Aksara, 1989)
- Cawidu, Harifuddin, "Konsep kufir dalam al-Qur'an: suatukajianteologisdenganpendekatan tafsir tematik," (No Title), 1991
- D, Moh. Mahfud M, Demokrasi dan konstitusi di Indonesia: studitentanginteraksipolitik dan kehidupanketatanegaraan (Rineka Cipta, 2000)
- Dewi, Dinasti Ayu Tunggal, "SistemDemokrasi Yang PernahDiterapkandi Indonesia," 2021
- Diantha, I Made Pasek, dan M S Sh, Metodologipenelitianhukumnormatifdalamjustifikasiteorihukum (Prenada Media, 2016)

- Dj, Yusrizal, "Negara Hukum Yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-undang Dasar Tahun 1945)," *Menara Ilmu*, 12.1 (2018)
- Djagardo, Leonard, dan S H Simanjuntak, "Salinan," *Ddii*, 2019, 1–327
- Djojosekarto, Agung, dan Rudi Hauter, *Pemilihan langsung kepala daerah: transformasi menuju demokrasi lokal (ADEKSI)*, 2003)
- Efendi, Jonaedi, Jhonny Ibrahim, dan Prasetijo Rijadi, "Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris," 2016
- Fishkin, James S, dan Peter Laslett, *Philosophy, Politics and Society: Fifth Series: a Collection* (Yale University Press, 1979)
- Hasanah, Siti, "Pola Berdemokrasi Dalam Uud 1945 Sesudah Amandemen," *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13.2 (2022), 361–72
- , "Sistem Pemilu dan Kualitas Produk Legislasi di Indonesia," Genta Publishing, Yogyakarta, 2018
- , *Sistem Pemilu Dan Kualitas Produk Legislasi Di Indonesia* (Genta Publishing, 2018)
- Hasanah, Siti, dan Sri Rejeki, "Wewenang Badan Pengawas Pemilu Terhadap Pelanggaran Pemilu oleh Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Kepala Daerah," *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 9.2 (2021), 43–52
- Herianto, Herman, "Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat, Ditinjau Pada Pasal 28 UUD 1945" (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022)
- Hidayat, Arief, "Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik Dan Hukum) Membangun Peradilan Tata Usaha Negara Yang Berwibawa," 2010
- Hidayat, Undang, "Negara hukum dan politik hukum Islam di Indonesia: Catatan kritis atas pemikiran Nurcholish Madjid," *Asy-Syari'ah*, 18.2 (2016), 261–76
- Hidayat, Yuristiarso, "Model Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Secara Bersama (Studi tentang Model Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gabungan di Jawa Timur Tahun 2008)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011)
- Hudri, Ahmad, *Badai Politik Uang dalam Demokrasi Lokal (Inteligensia Media)* (Kelompok Penerbit Intrans Publishing), 2020)
- Hutajulu, Josua, "Gagasan Perubahan Masa Jabatan Presiden Melalui Perubahan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Perspektif Konstitusionalisme," 2022
- Ibrahim, Johnny, "Teori dan metodologi penelitian hukum normatif," Malang: Bayu media Publishing, 57 (2006), 295
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang Dasar 1945* (Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader, 1959)
- , *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)

- Indria, Samego, "Book Review Ekonomi Politik," Pasca Sarjana Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta, 2000
- Khairul, Fahmi, "Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat," Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Kholisin, Misbachul, "Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Pendidikan Islam Dalam Perspektif Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 30" (Unisnu Jember, 2021)
- Kumalaningsih, Sri, "Metodologi Penelitian (Kupastuntascaramencapaitujuan)" (Malang: UB Press, 2012)
- Kusnardi, Moh, "Hermaily Ibrahim," Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan ke-5, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham, Partaipolitik dan sistem pemilihan umum di Indonesia (Rajawali Pers, 2015)
- Ladiqi, Suyatno, dan Ismail SuardiWekke, "Gambaran Demokrasi, Demokrasi, dan Perkembangan," Yogyakarta: Penerbit GB [GaweBuku]. Tersedia secara online juga di: [http://www.academia.edu/36308314/Gambaran\\_Demokrasi\\_Demografi\\_Dan\\_Perkembangan](http://www.academia.edu/36308314/Gambaran_Demokrasi_Demografi_Dan_Perkembangan) [diakses di Bandung, Jawa Barat, Indonesia: 14 Desember 2017], 2018
- Magnis-Suseno, Franz, Pemikiran Karl Marx: darisosalismeutopiskeperselisihanrevisionisme (Gramedia Pustaka Utama, 1999)
- Mahfud, Moh, Politik hukum di Indonesia (Lp3s, 1998)
- Marzuki, Mahmud, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017)
- Muhammad Syahrudin, S T, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (CV. Dotplus Publisher, 2022)
- Negeri, Kementerian Dalam, "Hubungan tugas Pemerintah Daerah dan DPRD (Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintah daerah)," Jakarta: Badan Diklat Depdagri, 2011
- RI, Kementerian Hukum Dan Ham, "Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Pemilihan Kepala Daerah," 2009
- Rizal, Akhmad, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan," in Indonesian Annual Conference Series, 2022, hal. 136–40
- Rumidi, Sukandar, "Metodologi penelitian petunjuk praktis untuk peneliti pemula," Yogyakarta: Gajah Mada University, 2004
- Simamora, Janpatar, "Eksistensi pemilu kadadalamrangkamewujudkan pemerintah daerah yang demokratis," Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23.1 (2011), 221–36
- Simatupang, Jonasmer, dan Muhammad Subekhan, "Pengaruh Budaya Politik Uang dalam Pemilu Terhadap Keberlanjutan Demokrasi

- Indonesia,” in Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018, IV, 1297–1312
- Sinaga, Parbuntian, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945,” *Binamulia Hukum*, 7.1 (2018), 17–25
- Sudaryanto, *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik* (Duta Wacana University Press, 1993)
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan* (Sinar Grafika, 2022)
- Sukmajati, Mada, dan Aditya Perdana, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, Tata Kelola Pemilu di Indonesia, 2019
- Sumadijono, Kavin Muhammad, “Urgensi Uji Publik Pencalonan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi,” 2017
- Sundari, Eva, dan M G Endang Sumiarni, *Politik hukum & tata hukum Indonesia* (Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Sunggono, Bambang, “Metodologi penelitian hukum,” 2006
- Supriyanto, Didik, Khoirunnisa Agustyati, dan August Mellaz, *Menata ulang jadwal pilkada: menuju pemilu nasional dan pemilu daerah* (Yayasan Perludem, 2013)
- Surbakti, Ramlan, “Sistem Pemilu Dan Tatahan Politik Demokrasi, Dalam Ramlan Surbakti, Dkk,” *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis, Kemitraan* Jakarta, hlm, 27 (2008)
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Hasyim Asy’ari, *Menjaga integritas pemungutan dan penghitungan suara* (Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011)
- Suriasumantri, Jujun S, “Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer,” 1993
- Suryana, Cecep, “Rekonstruksi partai politik dalam sistem politik Indonesia” (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2022)
- Suryana, Cecep, Nissa Aulina Fatimah, Muhamad Tajub Subki, dan Mochamad Ilyas Maulani, “Sistem Pemerintahan: Demokrasi dan Monarki” (Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022)
- Syafei, Mohammad, “Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No: 100/puu-xiii/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah” (Tadulako University)
- Syamsudin, Muhammad, dan M H SH, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif* (Kencana, 2011)
- Thaib, Dahlan, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945* (Liberty, 1989)
- Thurber, James Allen, *Political party recruitment and legislative role orientations*. (Indiana University, 1974)
- Tricahyo, Ibnu, *Reformasi Pemilu: Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal* (In-Trans Pub., 2009)
- Tutik, Titik Triwulan, “Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dalam

- Sistem Pemilu Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (Universitas Airlangga, 2005)
- “Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara,” 2003
- Usman, Anwar, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Membangun Peradaban dan Ketatanegaraan Indonesia sebagai Negara Hukum yang Konstitusional,” Republik Indonesia, 2019, 81
- Wahyono, Padmo, Pembangunan hukum di Indonesia (Ind-Hill-Company, 1989)
- West, Richard, dan Lynn H Turner, “Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi, Edisi ke-3, Jakarta: Bandung: PT, Remaja Rosdakarya, 2008
- Wignjosuebrot, Soetandyo, “Hukum: Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya,” (No Title), 2002
- Yustisia, Tim Visi, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (VisiMedia, 2015)
- Zulfikar, Achmad, dan Baharuddin Nur, “Implikasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara Serentak terhadap Aspek Sosial, Politik dan Ekonomi,” 2017
- Zulkarnaen, Beni Ahmad Saebani, “Hukum Konstitusi,” Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2012

#### **B. Jurnal dan Tesis**

- Abdullah, Abdurrahman, “Analisis Kritis Teori dan Penerapan Konsep Khilafah Pasca Nabi Muhammad SAW Wafat,” Politea: Jurnal Politik Islam, 4.1 (2021), 147–60
- Aminah, Siti, Halida Zia, Cindy Oeliga Yensi Afita, dan Yohanes Sitorus, “Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Threshold) dalam Pemilu,” Datin Law Jurnal, 1.1 (2020)
- Anam, Choirul, “Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah,” JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 6.2 (2018), 113–18
- Aprilia, Yosita, “Studi Komparasi Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensiil Dalam UUD 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018)
- Arif, Mokhammad Samsul, “Reformulasi Model Penyuaaran Paska Pemilu Serentak 2019: Studi Evaluasi Sistem Proporsional Daftar Terbuka,” Jurnal Wacana Politik, 4.2 (2019)
- Arrsa, Ria Casmi, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi,” Jurnal Konstitusi, 11.3 (2014), 515–37
- Ayuningtyas, Fitri, dan Adelia Wahyuningtyas, “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum,” Amnesti Jurnal Hukum, 5.1 (2023), 138–50
- Barus, Sonia Ivana, “Proses Perubahan Mendasar Konstitusi Indonesia Pra Dan Pasca Amandemen,” University Of Bengkulu Law Journal, 2.1 (2017), 29–55

- Darmawan, Darmawan, dan M Fajrul Falah, "Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 241–50
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, "Problematika Pelaksana Tugas (Plt) dalam Masa Transisi Pemerintahan (Pra dan Pasca Pilkada Serentak)," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1.2 (2015), 322–35
- Fatayati, Sun, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 28.1 (2017), 147–63
- Faturohman, Deden, "Demokrasi Lokal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2022
- Hasanah, Siti, Absori Absori, dan Harun Harun, "Integrasi Nilai Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Ke Dalam Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia," *istinbath*, 17.1 (2018), 240–58
- Hayat, Hayat, "Korelasi Pemilu Serentak dengan Multi Partai Sederhana Sebagai Penguatan Sistem Presidensial," *Jurnal Konstitusi*, 11.3 (2014), 468–91
- Hikmah, Mutiara, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara pada Proses Demokratisasi Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 39.4 (2017), 437–54
- Hutapea, Bungasan, "Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 4.1 (2015), 1–20
- Irawan, Benny Bambang, "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 5.1 (2016)
- Iswari, Fauzi, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6.1 (2020), 127–40
- Kasih, Ekawahyu, "Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Sistem Politik Di Indonesia Guna Mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," *Jurnal Lemhannas RI*, 6.2 (2018), 49–68
- Kokodaka, Sodiari, "Kajian Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung," *Justisia-Jurnal Ilmu Hukum*, 4.11 (2018), 265–83
- Manik, Hendra Kurniawan, "Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Studi Terhadap Rekrutmen Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Partai Demokrat Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan Tahun 2010" (Universitas Sumatera Utara, 2011)
- Nugraha, Harry Setya, "Gagasan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Lex Renaissance*, 3.1 (2018), 11
- Paransi, Chrisly D N, "Perspektif Hukum Undang-Undang No 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah Khusus Pemilihan Kepala



- Daerah Dan Wakil Kepala Daerah,” *Lex Administratum*, 2.2 (2014)
- Paskarina, Caroline, “Pilkada Serentak, Eksklusi Partai Politik, dan Masa Depan Politik Representasi,” *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2.1 (2016), 24–38
- Permana, I Putu Yogi Indra, “Kajian Yuridis Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat,” *Jurnal Yuridis*, 5.2 (2018), 173–85
- Pigome, Martha, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945,” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11.2 (2011), 335–48
- Pratama Maulidditya, Rivaldy, “Strategi Marketing Politik Pasangan Ade Uu Sukaesih Dan Nana Suryana Pada Pemilihan Walikota Banjar Tahun 2018” (Universitas Siliwangi, 2019)
- Rajab, Achmadudin, “Urgensi Perubahan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3.2 (2018), 177–89
- Rifa’i, Ahmad, dan Sri Kusriyah, “Peran Partai Politik Dalam Pengawasan Terhadap Kadernya Yang Duduk Di DPRD Untuk Meningkatkan Kualitas Perwakilan Ahmad Rifa’i\*, Sri Kusriyah,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 12.4 (2017), 981–92
- Rizqi, Alda Rifada, “Menakar Progresifitas Lembaga Peradilan dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 12.2 (2018), 2102–17
- Rofelawaty, Budi, dan Abdul Kadir, “Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu Ri No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 5.2 (2019), 30–48
- Salim, Moh Noval Ibrohim, “Karakteristik Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Daerah” (Universitas Airlangga, 2016)
- Sari, Dian Octapulia, Syamsurizaldi Syamsurizaldi, dan Yuslim Yuslim, “Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja KPU Kabupaten Bungo Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6.2 (2019), 298–313
- Selma, Muhammad Yahya, “Perjalanan Panjang Pemilu Di Indonesia,” *Konstitusi Jurnal*, 1.1 (2009), 8

- Seran, Gotfridus Goris, “Konstitusionalitas dan Desain Pemilu pada Langsung Serentak Nasional,” *Jurnal Konstitusi*, 16.3 (2019), 655–76
- Simbolon, Hanizar Meda, Siti Saadah Siagian, dan Bahri Bahri, “Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6.1 (2023), 161–68
- Sutisna, Sutisna, “Mekanisme Pemilihan Kepala Negara Dalam Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 1.01 (2017)
- Syafruddin, dan Siti Hasanah, “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024,” *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol 04, No (2022), 155–74
- Tanjung, Indra Utama, “Studi Komparative Pendirian Negara Khilafah Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 2018
- Widianingsih, Yuliani, “Demokrasi dan pemilu di indonesia: suatu tinjauan dari aspek sejarah dan sosiologi politik,” *Journal Signal*, 5.2 (2017)
- Widyana, Maulida Rita, dan Addien Fikriansyah, “Analisis SOAR: Dampak penundaan pilkada tahun 2022 dan 2023,” *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 4.2 (2021), 52–65
- Wijaya, Henri, “Menakar Derajat Kepastian Hukum dalam Pemilu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4.1 (2020), 82–104
- Zoelva, Hamdan, “Problematika penyelesaian sengketa hasil pemilu pada oleh Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi*, 10.3 (2013), Zoelva-Zoelva

### C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2002)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
- Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)